

IMPLEMENTASI PASAL 287 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR. 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ TERHADAP FENOMENA KEBUT- KEBUTAN SEPEDA MOTOR (*SPEEDING*) DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG

Oleh

Ketut Suryawan, NIM 2214101027

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti (1) menganalisis implementasi penerapan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani fenomena *speeding* sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Buleleng. (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan pasal ini pada kasus-kasus *speeding* yang terjadi di wilayah hukum yang sama. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada kesenjangan antara hukum (*das sollen*) dan (*das sein*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan personel Unit Lalu Lintas Kepolisian Buleleng, pelaku ngebut, dan observasi lapangan langsung dari September 2025 hingga Maret 2026, didukung oleh studi dokumen data tilang dan laporan kepolisian.

Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama. (1) penerapan Pasal 287 ayat (5) di wilayah hukum Polres Buleleng saat ini belum berjalan secara efektif. Hal ini terindikasi dari frekuensi pelanggaran yang tetap tinggi serta belum terjadinya perubahan perilaku berkendara masyarakat secara signifikan, di mana penegakan hukum masih bersifat represif-insidentil dan belum mampu menciptakan efek jera yang menyeluruh. (2) terdapat kendala kompleks dalam implementasi aturan tersebut yang meliputi faktor internal dan eksternal. Kendala internal mencakup defisit jumlah personel patroli operasional serta minimnya dukungan teknologi pengawasan seperti alat ukur kecepatan (*speed gun*). Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum, adanya pola adaptasi digital para pelaku untuk menghindari razia, serta faktor psikologis remaja yang menormalisasi aksi *speeding* sebagai ajang pembuktian eksistensi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan sarana prasarana teknologi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas.

Kata Kunci: Implementasi Hukum; Kebut-kebutan (*Speeding*); Pasal 287 Ayat (5) UU LLAJ; Polres Buleleng.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 287 PARAGRAPH (5) OF LAW
NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING LLAJ TOWARDS THE
PHENOMENON OF MOTORCYCLE SPEEDING IN THE JURISDICTION
OF THE BULELENG POLICE REGION**

By

Ketut Suryawan, NIM. 2214101027

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to (1) analyze the effectiveness of the application of Article 287 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in addressing the phenomenon of motorcycle speeding within the jurisdiction of the Buleleng Police. (2) identify the obstacles faced by the police in applying this article to speeding cases occurring within the same jurisdiction. This study uses an empirical legal method that focuses on the gap between the law (das sollen) and (das sein). Data collection was conducted through in-depth interviews with personnel from the Buleleng Police Traffic Unit, speeding perpetrators, and direct field observations from September 2025 to March 2026, supported by document studies of ticket data and police reports.

The results of the study indicate two main points. (1) the application of Article 287 paragraph (5) within the jurisdiction of the Buleleng Police is currently ineffective. This is indicated by the consistently high frequency of violations and the lack of significant changes in public driving behavior, where law enforcement remains repressive-incidental and has not been able to create a comprehensive deterrent effect. (2) There are complex obstacles to the implementation of this regulation, encompassing both internal and external factors. Internal obstacles include a shortage of operational patrol personnel and a lack of technological surveillance support, such as speed guns. Meanwhile, external obstacles include low legal awareness, perpetrators' digital adaptation patterns to avoid raids, and psychological factors among adolescents who normalize speeding as a way to prove their presence. This study recommends strengthening technological infrastructure and cross-sector collaboration to optimize traffic law enforcement.

Keywords: Implementation of the Law; Speeding; Article 287 Paragraph (5) of the LLAJ Law; Buleleng Police.